
AKREDITASI SEKOLAH DAN MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA

Oleh

Akhmad Fadhilah¹, Ramadani², Sandy³, Aslamiah⁴, Celia Cinantya⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Lambung Mangkurat

Email: ¹Akhmadfadhilah0601@gmail.com, ²lesandy20@gmail.com

Article History:

Received: 09-11-2024

Revised: 23-11-2024

Accepted: 12-12-2024

Keywords:

Akreditasi Sekolah, Mutu Pendidikan

Abstract: Artikel ini akan membahas akreditasi sekolah dan mutu pendidikan di Indonesia tujuan penulisan ini untuk mendeskripsikan (1) mutu pendidikan (2) akreditasi sekolah (3) program akreditasi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan (4) permasalahan akreditasi di Indonesia. akreditasi sekolah dikatakan sebagai simbol mutu pendidikan karena akreditasi didapat melalui tindakan penilaian kelayakan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. program akreditasi disusun dengan baik berdasarkan permasalahan akreditasi sebelumnya supaya dapat memakai strategi efektif untuk mencapai mutu pendidikan yang baik.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini, dunia pendidikan dihadapkan pada tuntutan untuk senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kemajuan zaman terutama dalam bidang teknologi dan informasi yang berkembang dengan sangat cepat, diharapkan pendidikan dapat terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Pendidikan memiliki peran yang sangat vital dalam memajukan sebuah negara serta membentuk karakter dan jati diri bangsa. Selain itu, pendidikan juga merupakan salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi negara. (Fahrudin, 2020) (Cinantya et al., 2024).

Di era abad ke-21 yang berimplikasi pada peningkatan daya saing kualitas sumber daya manusia, pengembangan kepribadian yang disertai dengan keterampilan yang mumpuni menjadi dasar tuntutan keterampilan pada abad ini (Aljarrah & Khataybeh, 2021) (Aslamiah et al., 2021; Suriansyah et al., 2020). Di era ini pula menuntut setiap individu untuk menguasai keterampilan digital (Amelia et al., 2019; Noorhapizah et al., 2020). Maka daripada itu dibutuhkan generasi yang unggul untuk meningkatkan kompetensi guna mempertahankan eksistensinya dalam perkembangan kehidupan. Salah satu faktor penting dalam menciptakan generasi unggul adalah kualitas pendidikan yang unggul. (Lubis, 2018; Akyıldız & Seçil, 2019; Laar dkk.2020; Banmaiuroy et al., 2021; Lathifah, Z.K., Setyaningsih, S., & Wulandari D. 2022)(Aslamiah et al., 2023).

Dalam hal kualitas pendidikan, terdapat standar yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Standar nasional ini telah melalui proses kajian dan dirancang agar dapat dicapai oleh setiap lembaga pendidikan di Indonesia. Konsep standarisasi pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, sehingga diharapkan dengan

adanya standar tersebut, sekolah-sekolah akan termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi siswa di lingkungan pendidikannya.

Mutu pendidikan merupakan tujuan terpenting bagi pengelolaan sistem pendidikan bangsa, yang mengharapkan lembaga pendidikan yang kompeten dan siap untuk menyediakan orang-orang mereka dengan setara dan menyeluruh layanan pendidikan. Pendidik yang mereka terima harus memenuhi standar dan memenuhi semua persyaratan lokal masyarakat dengan baik dan efektif (Ajpru, Wongwanich, & Khaikleng, 2014).

Saat ini, tantangan utama dalam bidang pendidikan di Indonesia telah berubah dari fokus pada peningkatan akses menjadi fokus pada peningkatan kualitas. Pemerintah Indonesia berharap dapat mengembangkan sistem pendidikan bertaraf internasional pada tahun 2025 (Rosser, 2018). Selain itu dunia pendidikan saat ini sedang mengalami masalah yang cukup berat. Masalah tersebut terkait dengan mutu pendidikan. Saat ini tingkat mutu pendidikan di Indonesia masih jauh dari harapan masyarakat sebagai pengguna (*stakeholder*) dan konsumen pendidikan. Salah satu hal yang menunjukkan bahwa rendahnya mutu pendidikan yaitu masih rendahnya kualitas atau mutu lulusan (Syafarudin, 2002; Zahroh, 2015). Maka dari itu lembaga pendidikan wajib mempersiapkan diri dengan cara meningkatkan dan memperbaiki mutu dan kualitasnya.

Pendidikan yang bermutu tentunya tidak hadir dengan sendirinya dalam setiap jenjang pendidikan, sehingga dalam hal menjamin mutu pendidikan pada sebuah sekolah dibuat program penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal (Iskandar, 2017). Penjaminan mutu internal bisa dilakukan langsung oleh sebuah institusi pendidikan dengan cara melakukan evaluasi diri dan lain sebagainya. Sedangkan penjaminan mutu eksternal pada sebuah sekolah/madrasah akan dilakukan dengan sebuah sistem standarisasi yang ditetapkan.

Kebijakan peningkatan mutu di sekolah dapat dilakukan dengan proses standarisasi pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam standarisasi ini perlu disiapkan karena memiliki makna penting dalam membangun bangsa. Salah satu fungsi standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan disebutkan dalam Bab VI PP No 57 Tahun 2021, yaitu akreditasi. Akreditasi merupakan proses untuk menilai kinerja terhadap kelayakan program yang terdapat dalam satuan pendidikan (Awaludin, 2017). Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program pendidikan dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada SNP. Akreditasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Lembaga sendiri secara mandiri. Hasil dari akreditasi menjadi sebuah dasar dalam hal penetapan status akreditasi (Pasal 51 ayat 2). (Susetyo & Muksin, 2022)

Penjaminan mutu institusi pendidikan sebagai pemberi layanan berkualitas harus segera dilakukan percepatan melalui pelaksanaan akreditasi sekolah dan implementasi model TQM dalam penyelenggaraan sekolah. (Suriansyah, 2009).

Pelaksanaan Akreditasi sekolah diperlukan harus memiliki makna untuk mendorong dan mempercepat pertumbuhan juga pengembangan sekolah yang kaitannya dengan kebutuhan untuk mencapai keunggulan yang lebih baik, relevan, dan efektifitas. Selain itu, akreditasi sekolah juga dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila akreditasi sekolah berjalan dengan baik, maka peningkatan mutu pendidikan beriringan berdampak

baik pula.

APA (2008) menyebutkan bahwa Akreditasi merupakan status sekaligus proses. Sebagai status, akreditasi memberikan pemberitahuan publik bahwa suatu lembaga atau program memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi. Sebagai suatu proses, akreditasi mencerminkan fakta bahwa dalam mencapai pengakuan oleh badan akreditasi, lembaga atau program berkomitmen untuk belajar sendiri dan tinjauan eksternal oleh rekan-rekan dalam upaya tidak hanya untuk memenuhi standar tetapi untuk terus mencari cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang diberikan. (Ching, 2013).

Akreditasi merupakan alat regulasi diri (self-regulation) yang dilakukan agar sekolah mengenal kekuatan dan kelemahan serta melakukan upaya yang terus menerus untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahannya. Dalam menjalankan fungsinya sebagai tempat proses pembinaan manusia, maka tentunya sekolah perlu diawasi dan dievaluasi seluruh aspek pendidikannya, baik dari proses maupun dari hasil lulusan sekolah tersebut sehingga dengan akreditasi tersebut dapat memotret kelayakan dan mutu dari sekolah, akan tetapi beberapa fenomena yang terjadi terkadang sekolah belum secara penuh melakukan manajemen akreditasinya secara baik, karena kurangnya persiapan kelengkapan administrasi, sehingga sekolah cenderung mengadakan dokumen yang dalam kenyataannya belum tentu ada. Maka karena pentingnya akreditasi dalam suatu lembaga pendidikan, maka peneliti tertarik untuk meneliti manajemen akreditasi sekolah upaya meningkatkan mutu Pendidikan (Afridoni et al, 2022)

Akreditasi digunakan sebagai indikator kualitas tidak langsung yang dapat digunakan untuk membedakan program dan lembaga dalam hal kualitas (Tayag, 2005). Pada saat yang sama, sarana dipakai untuk mempromosikan peningkatan kualitas, ini juga merupakan cara untuk mendorong sekolah-sekolah yang dinilai telah mencapai standar yang diinginkan untuk berbuat lebih baik (Khoo, Majid, & Chaudhry, 2003). Secara sederhana, akreditasi adalah sarana untuk merangsang dan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan kelembagaan sekolah yang ingin mencapai keunggulan, relevansi, dan efektivitas. Pada akhirnya, tujuan akreditasi adalah untuk memastikan bahwa pendidikan yang disediakan oleh institusi pendidikan tinggi memenuhi tingkat kualitas yang dapat diterima. (Ching, 2013).

Namun berdasarkan fakta yang terjadi pelaksanaan akreditasi hanya menjadi sebatas pengakuan formal untuk mendapatkan nilai saja, akreditasi sekolah masih menjadi sebatas tuntutan administrasi yang harus ditunaikan. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan akan merasakan tertekan saat waktunya sekolah akan diakreditasi, karena ketidaksiapan sekolah dan tuntutan administratif yang begitu besar sehingga menjadikan akreditasi sekolah sebagai sebuah beban sehingga menghasilkan manipulasi dalam akreditasi sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Crosby mutu adalah sesuai yang disyaratkan atau distandarkan (*Conformance to requirement*), yaitu sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan, baik inputnya, prosesnya maupun outputnya. Oleh karena itu, mutu pendidikan yang diselenggarakan sekolah dituntut untuk memiliki baku, standar mutu pendidikan. Mutu dalam konsep Deming merupakan kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Dalam konsep Deming, pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan keluaran, baik pelayanan dan lulusan

yang sesuai kebutuhan atau harapan pelanggan (pasar) nya. Sedangkan Fiegenbaum mengartikan mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (full customer satisfaction). Dalam pengertian ini, maka yang dikatakan sekolah bermutu adalah sekolah yang dapat memuaskan seluruh pengguna/pelanggannya, baik pelanggan internal maupun eksternal. (Samsirin, 2015).

Mutu dalam manajemen mempunyai arti kualitas. Dalam bahasa Inggris, mutu diistilahkan dengan "quality". Sedangkan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah "juudah". Secara istilah mutu menunjukkan kepada sesuatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan suatu jasa. Konsep mutu mengandung pengertian keunggulan suatu produk baik berupa barang maupun jasa (Fahrudin, 2022).

Arcaro (2007) memaparkan mutu adalah faktor keputusan mendasar dari pelanggan. Mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan keluaran, baik pelayanan, dan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan atau harapan pelanggan (pasar)nya. Secara konseptual, mutu selalu berkaitan dengan pelanggan, pembeli, pemakai produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu lembaga maupun perseorangan. (Zahroh, 2015)

Mutu pendidikan umumnya dapat diukur dari segi input, proses, output maupun outcome. Ada 13 karakteristik yang dapat dinilai dalam hal mutu pendidikan yaitu: kinerja (performance), waktu wajar (timelines), handal (reliability), daya tahan (durability), indah (aesthetics), relasi manusiawi (personal interface), mudah penggunaannya (easy of use), bentuk khusus (feature), standar tertentu (conformance to specification), konsistensi (consistency), seragam (uniformity), mampu melayani (serviceability), akurasi (accuracy). (Usman, 2004; Fahrudin, 2022).

Peningkatan mutu pendidikan mempengaruhi metode kerja, budaya kerja dan budaya organisasi yang saling berkaitan satu sama lain. Tanpa budaya kerja dan organisasi yang mengarah pada budaya kerja berkualitas tinggi, upaya peningkatan kualitas yang optimal tidak akan tercapai seperti yang diharapkan (Suriansyah, 2014).

Pada peningkatan mutu pendidikan harus mengambil langkah sebagai berikut:

1. Pemerintah menanggung biaya minimum pendidikan yang diperlukan anak usia sekolah baik negeri maupun swasta yang diberikan kepada siswa secara individual.
2. Optimalisasi sumber daya pendidikan yang sudah tersedia, antara lain melalui double shift (contoh pemberdayaan SMP terbuka dan kelas jauh)
3. Memberdayakan sekolah-sekolah swasta melalui bantuan dan subsidi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran siswa dan optimalisasi daya tampung yang tersedia.
4. Melanjutkan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi daerah-daerah yang membutuhkan dengan memperhatikan peta pendidikan di tiap-tiap daerah sehingga tidak mengganggu keberadaan sekolah swasta.
5. Memberikan perhatian khusus bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin, masyarakat terpencil, masyarakat terisolasi, dan daerah kumuh.
6. Meningkatkan partisipasi anggota masyarakat dan pemerintah daerah untuk ikut serta menangani penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (Sidi, 2003; Fahrudin, 2020)

Terdapat empat pilar mutu yang dimaksud yaitu: 1) layanan pelanggan, 2) perbaikan terus-menerus, 3) proses dan fakta-fakta, dan 4) menghormati orang. Setiap lembaga

pendidikan masalahnya berbeda tetapi inti permasalahannya sama. Keempat pilar harus ditangani dengan baik dalam rangka meminimalkan kesalahan. Salah satu pilar tidak dijalankan dengan baik dapat meruntuhkan mutu pendidikan secara keseluruhan (Fahrudin, 2020).

Pendidikan dianggap bermutu jika mampu menunjukkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler. Berikut ini akan dijelaskan satu per satu secara lebih detail. Pertama, input. Input adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Input meliputi: kebijakan mutu dan harapan, sumber daya (kesediaan masyarakat), berorientasi peserta didik, manajemen (pembagian tugas, perencanaan, kendali mutu, dan efisiensi). Kedua, proses. Proses merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut output. Ketiga, output. Output dapat dijelaskan bahwa output sekolah dikatakan berkualitas atau bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khususnya prestasi belajar peserta didik menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam; prestasi akademik: NEM, lomba karya ilmiah, olimpiade, dan kejuaraan-kejuaraan yang lain. Dan prestasi non akademik: olahraga, kepramukaan, kesenian, kerajinan dan lain-lain (Abdul Rachman Shaleh, 2006; Zahroh, 2015).

Strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan mengoptimalkan aspek aspek berikut (Susanti, 2015):

1) Pengajaran; 2) Kemampuan Kerja; 3) Penginternasionalan; 4) Fasilitas; 5) Pembelajaran jarak jauh secara daring; 6) tanggung jawab sosial; 7) Inovasi; 8) Seni dan budaya; 9) Inklusivitas; 10) Spesialisasi. Indikator yang menjadi perhatian dalam aspek penelitian adalah kualitas penelitian sebagai salah satu kegiatan akademik. Beberapa indikator lainnya adalah produktivitas, kutipan oleh peneliti lain, dan penghargaan untuk penelitian. (Pramana et al, 2021).

Empat pilar manajemen diharapkan dapat menciptakan pendidikan yang berkualitas pada akhirnya. Kualitas pendidikan bisa diukur dengan indikator yang meliputi: Kompetensi Lulusan, Isi, Proses, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, Manajemen, Pembiayaan dan Penilaian Pendidikan (Poernamawijaya, Suriansyah, Sulaiman, Dalle, 2018).

B. Akreditasi Sekolah

Akreditasi diartikan sebagai suatu proses untuk memberikan asesmen terhadap kualitas menggunakan instrument kriteria mutu yang sudah ditetapkan. Akreditasi dapat diartikan sebagai suatu proses, yang meliputi penilaian profesional untuk mengevaluasi bahwa suatu lembaga pendidikan tersebut memenuhi standar yang sudah ditentukan atau tidak (Prados, 2005; Azizah & Witri, 2021)

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam rangka menerapkan pengawasan dan evaluasi untuk mendapatkan pemetaan terhadap mutu pendidikan di Indonesia, maka pemerintah atau lembaga, serta lembaga mandiri yang ditunjuk dan memiliki kewenangan untuk menentukan kelayakan/ program dari satuan pendidikan baik formal maupun non formal yang berdasarkan kepada aturan dan standar yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pendidikan kepada public dengan penerapan yang secara objektif, adil, transparan dan menyeluruh. (Astenia, Dewi, 2020).

Di negara-negara berkembang, di mana kualitas pendidikan sedang dalam proses diatur secara tepat, akreditasi global relevan karena menjamin pendidikan para profesional yang memenuhi standar akademik internasional. Nilai proses akreditasi berkaitan dengan fakta bahwa sekolah atau lembaga perlu ditata dalam prosedur administrasi dan akademik untuk mencapai akreditasi, yang menghasilkan standarisasi dan perolehan kompetensi internasional, peningkatan berkelanjutan dan kualitas pendidikan. (Rios&Aviedo, 2022)

UU SISDIKNAS 2003 menyatakan akreditasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan penilaian kelayakan program di tiap satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan Akreditasi ini diberlakukan sebagai bahan penilaian dan juga pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan. Hal ini juga sebagai tolok ukur penyelenggaraan pendidikan di setiap jenjangnya. Akreditasi ini pula yang dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat sejauh mana kondisi riil yang ada di sekolah dengan standar nasional pendidikan yang sudah dirumuskan. (Rahman, 2020)

Akreditasi sekolah merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Menurut Permendikbud No. 59 tahun 2012, bahwa Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BAN- SM) merupakan badan mandiri yang menetapkan kelayakan suatu program dan atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan (SNP). Akreditasi sekolah juga diartikan sebagai proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan dan/atau program pendidikan, yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada publik, apakah layanan yang dilaksanakan dan diberikan oleh sekolah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akreditasi sekolah merupakan suatu proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan suatu program pendidikan dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Dalam pelaksanaan akreditasi, ada beberapa tujuan dan manfaat yang diharapkan selain dapat memetakan mutu pendidikan berdasarkan SNP, bagi kepala sekolah/madrasah, hasil akreditasi diharapkan dapat dijadikan bahan informasi untuk pemetaan indikator kelayakan sekolah/madrasah, kinerja warga sekolah/madrasah, termasuk kinerja kepala sekolah/madrasah selama periode kepemimpinannya (Buzdar, et al., 2018).

Di samping itu, hasil akreditasi juga diperlukan kepala sekolah/madrasah sebagai bahan masukan untuk penyusunan program serta anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah (Fitrah, 2017). Bagi guru, hasil akreditasi merupakan dorongan untuk selalu meningkatkan diri dan bekerja keras dalam memberikan layanan terbaik bagi peserta didik guna mempertahankan dan meningkatkan mutu sekolah/madrasah. Secara moral, guru senang bekerja di sekolah/madrasah yang diakui sebagai sekolah/madrasah bermutu. Sementara bagi pemerintah hasil akreditasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan

dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan nasional (Malik et al., 2018; Andriesgo, Haris, & Joni, 2020).

Fungsi dari akreditasi meliputi pengakuan kelayakan dan kelayakan, pertanggung jawaban kepada publik sebagai pengguna akhir apakah tuntutan mereka telah dipenuhi atau tidak, dan perbaikan dan pengembangan sebagai dasar agar semua pihak terkait meningkatkan dan mengembangkan kualitas. Pendidikan. (Haryati, 2014).

Dalam penilaian akreditasi, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, agar proses yang dijalani sesuai dengan tujuan akreditasi yakni meningkatkan mutu pendidikan. Prinsip tersebut antara lain :

- a) Objektif: Pada prinsipnya, proses akreditasi ini merupakan suatu tolok ukur untuk melihat bagaimana sebuah lembaga pendidikan dapat berjalan. Karenanya, penilaian harus dilakukan secara objektif dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan lembaga pendidikan.
- b) Komprehensif: penilaian dalam akreditasi dilakukan secara keseluruhan, tidak terbatas pada aspek-aspek tertentu saja agar mendapatkan informasi sekolah secara utuh dan menyeluruh.
- c) Adil: semua lembaga pendidikan, baik sekolah ataupun madrasah mendapatkan pelayanan penilaian yang sama, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal itu dilakukan tanpa memandang kultur sosial-budaya, keyakinan, ras, maupun status sekolah negeri maupun swasta.
- d) Transparan: setiap sekolah yang bersiap untuk dilakukan akreditasi memiliki hak akses keterbukaan informasi yang berkaitan tentang kriteria, jadwal, sistem penilaian, persyaratan, dan hal-hal yang harus dipenuhi selama proses akreditasi.
- e) Akuntabel: proses maupun hasil selama akreditasi dapat dipertanggungjawabkan.
- f) Profesional: akreditasi dilakukan secara hati-hati oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya, sehingga proses dan hasil yang didapatkan nantinya dapat dijadikan sebagai acuan dan dasar perbaikan. (Draf Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah, 2018; Rahman, 2020).

Dalam pelaksanaan akreditasi tentunya sekolah memiliki keinginan dan harapan mendapatkan nilai terbaik dalam hal ini penilaian akreditasi berupa huruf A sebagai nilai terbaiknya, maka ada beberapa langkah yang dapat dilakukan : 1). Seluruh stekholder satuan pendidikan harus memiliki motivasi dan harapan yang sama dengan rasa optimis mendapatkan nilai A, 2). Seluruh stekholder satuan pendidikan harus mempersiapkan akreditasi dengan kesungguhan, memiliki koordinasi, komunikasi yang baik, serta yang paling penting adalah pembagian tugas yang jelas, sehingga dapat mengerjakan tugas sesuai dengan jobs description masing-masing. (Afridoni et al, 2022)

Dalam proses pelaksanaan akreditasi tentunya lembaga tidak berjalan mulus, lembaga pendidikan terdapat beberapa faktor yang menjadi pengambat proses akreditasi :

1. Banyaknya pekerjaan guru, terutama di lembaga pendidikan swasta sehingga keterbatasan waktu dalam persiapan akreditasi, solusi yang harus diterapkan adalah membuat perencanaan jauh- jauh hari sehingga guru dapat mencicil pekerjaannya,
2. Pada lembaga pendidikan swasta, adanya guru yang keluar masuk, sehingga sering terjadi pergantian panitia, solusinya adalah memberikan bimbingan kepada guru yang baru agar bisa menyesuaikan diri dengan beban tugas,

3. Bukti fisik atau dokumen yang lama yang tidak tersusun dengan rapi atau hilang solusinya panitia harus mencari dokumen tersebut dengan bekerja sama atau ada lembaga pendidikan yang kembali mengadakan dokumen tersebut walaupun kegiatan kenyataannya telah lama.persoalan mendasar yang harus dihindari adalah memanipulasi data/dokumen yang sebenarnya kegiatannya tidak ada,
4. Sarana dan prasarana yang kurang memadai, solusinya melalui wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana mempersiapkan keperluan kareditasi. (Afridoni et al, 2022)

C. Program Akreditasi Sekolah dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan.

Proses peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah ini merupakan proses penilaian kelayakan sekolah. SK Mendiknas No.087/U/2002 tentang Pedoman Akreditasi Sekolah menjelaskan bahwa tujuan akreditasi adalah untuk memperoleh gambaran kinerja dan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang diwujudkan dalam predikat atau status sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan(Sururi,2008;Asy'ari,Munawaroh&Il mi, 2021).

Melalui akreditasi terdapat hal-hal yang mengarah dalam penjaminan mutu diantaranya dengan adanya proses peningkatan kualitas sekolah, mengetahui gambaran kinerja sekolah yang sebenarnya, sebagai gambaran kelayakan dalam penyelenggara pendidikan serta menjadi alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah (Awaludin, 2017).

Peningkatan mutu pendidikan sekolah melalui akreditasi harus melibatkan seluruh pelaku pendidikan. Pelibatan berupa upaya untuk melakukan kretifitas dan inovasi baru. Jadi sekolah bisa dikatakan mampu menjalani program-program yang sudah ditentukan dengan baik dan agar mencapai suatu tujuan yang diinginkan juga harus benar-benar mengoptimalkan persiapan sampai dengan pelaksanaannya, tidak hanya mementingkan untuk mendapatkan akreditasi saja akan tetapi benar-benar dikelola dengan baik dan melibatkan seluruh komponen yang terdapat dalam satuan pendidikan tersebut. (Azizah&Witri, 2020)

Dengan demikian akreditasi sekolah bagi peningkatan kualitas pendidikan cukup memberi warna dengan melengkapi standar- standar yang ada. Standar tersebut sebagai indikator sekolah sebagai lembaga yang benar- benar layak mendapatkan akreditasi, kualitas layanan meningkat, dan semakin baik (Nujumuddin, 2019). Mutu pendidikan merupakan bagian penting sebagai bukti keunggulan serta usaha dari setiap lembaga. Oleh karena itu dalam pencapaian mutu pendidikan tersebut siswa dalam proses belajar mengajar merupakan tolok ukur dari keberhasilan pembelajaran.

Sebagai sarana dalam sebuah pengukuran keberhasilan perkembangan lembaga, akreditasi mempunyai dampak yang bisa membantu sebuah satuan lembaga semakin berkembang sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang sudah ditetapkan. Berbicara mengenai akreditasi sebagai acuan kelayakan kinerja sekolah, tentunya juga harus mengetahui kelayakan tersebut bertujuan untuk apa. Kelayakan tersebut diartikan sebagai kualitas satuan pendidikan yang bisa disebut dengan mutu satuan lembaga pendidikan. Akan tetapi dalam sebuah permasalahan bahwasanya akreditasi belum tentu menjamin mutu pendidikan lembaga tersebut semakin meningkat atau bahkan menurun, karena juga

terdapat sekolah yang akreditasinya rendah tetapi dalam kenyataannya tidak mempresentasikan rendahnya dalam mutu lembaga tersebut (Karyanto, 2015).

Perangkat Akreditasi merupakan alat penilaian mutu Pendidikan yang valid dan reliabel dengan mengacu pada hasil-hasil riset dari berbagai pakar baik nasional maupun international tentang sekolah efektif, benchmarking akreditasi International, Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan-peraturan yang terkait. Perangkat yang bermutu terdiri atas instrument, Petunjuk Teknis, Data dan Informasi Pendukung, kesimpulan penilaian, dan Teknik penskoran (Awaludin, 2017; Rahmaniati, 2022). Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Dapat dijadikan sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu Sekolah/Madrasah dan rencana pengembangan Sekolah/Madrasah.
2. Dapat dijadikan sebagai motivator agar Sekolah/Madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional.
3. Dapat dijadikan umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga Sekolah/Madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program Sekolah/Madrasah.
4. Membantu mengidentifikasi Sekolah/Madrasah dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donatur atau bentuk bantuan lainnya.
5. Bahan informasi bagi Sekolah/Madrasah sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga dan dana.
6. Membantu Sekolah/Madrasah dalam menentukan dan mempermudah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru dan kerjasama yang saling menguntungkan.

D. Permasalahan Akreditasi di Indonesia

Adanya penetapan akreditasi sekolah diharapkan bisa memaksimalkan program yang nantinya tidak hanya mendapatkan penetapan akreditasi akan tetapi kualitas pendidikannya juga semakin lebih baik (Utiahman, 2017). Perbaikan tersebut tidak hanya dilakukan pada saat akreditasi saja akan tetapi juga dilakukan setelah akreditasi berlangsung. Beberapa sekolah juga melakukan evaluasi setelah selesainya akreditasi dan berkomitmen untuk mempertahankan yang sudah baik dan meningkatkan program-program yang kurang maksimal (Asopwan, 2018). Hasil dari adanya akreditasi sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dapat terlaksana apabila pengelola program sekolah terus berusaha secara maksimal dalam meningkatkan mutu pendidikan. (Azizah&Witri, 2021).

Akan tetapi, sekalipun sistem akreditasi ini telah disusun sedemikian rupa, namun pada pelaksanaannya belum banyak sekolah yang mampu memanfaatkan instrumen yang ada dalam akreditasi tersebut untuk meningkatkan kapasitas lembaga pendidikannya. Fakta ini terlihat dari masih maraknya sekolah yang memenuhi instrumen akreditasi ketika hendak dilaksanakan kegiatan visitasi semata, dan kemudian kembali tidak berjalan optimal manakala proses visitasi telah usai dilaksanakan. Produktifitas sekolah menjadi meningkat ketika proses akreditasi akan dilakukan yakni dengan penyiapan dokumen sesuai dengan aturan yang ada, namun ketika akreditasi telah usai dilaksanakan produktifitas komponen

akan kembali seperti semula (Asofwan, 2018).

Selain yang telah dipaparkan diatas, dari data dilapangan juga diperoleh fakta penyelenggaraan akreditasi sekolah/madrasah saat ini menghadapi beberapa persoalan, diantaranya: (1) hasil akreditasi belum menggambarkan kondisi objektif sekolah; (2) hasil akreditasi belum menunjukkan indikator akuntabilitas; (3) hasil akreditasi sekolah belum dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah; (4) peringkat hasil akreditasi belum mampu menggambarkan kelayakan sekolah; dan (5) hasil akreditasi belum mampu memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan.

Berdasarkan permasalahan akreditasi yang selama ini terjadi dan hasil simpulan peneliti-peneliti terdahulu yang termuat dalam jurnal-jurnal internasional, maka untuk dapat mencapai hasil akreditasi yang sesuai dengan tujuan dan manfaat akreditasi perlu dikembangkan model penyelenggaraan akreditasi yang mampu menjawab permasalahan-permasalahan tersebut.

Untuk itu di tahun 2019, BAN-S/M telah memformulasikan dan menetapkan kebijakan prioritas untuk menyusun perangkat akreditasi yang baru, atau disebut Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP-2020). Adanya perubahan paradigma dalam penilaian akreditasi Sekolah/Madrasah dari penilaian berbasis administrasi (compliance) menuju penilaian berbasis kinerja (performance based) atau rule to principles. IASP-2020 dikembangkan dengan menitik beratkan penilaian pada empat komponen penilaian yaitu Mutu Lulusan, proses Pembelajaran, Mutu Guru, dan Manajemen Sekolah/Madrasah. Kerangka dasar IASP 2020 diturunkan menjadi instrumen akreditasi baik yang berbasis kepatuhan administratif maupun instrumen akreditasi yang berbasis kinerja. Instrumen tersebut diberi nama Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) Tahun 2020 disingkat IASP2020 (Dinihari et al., 2021; Hasanah, 2021; Rahmaniati, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki outcome yang dihasilkan. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan keluaran, baik berupa pelayanan, maupun lulusan yang sesuai dengan kebutuhan atau harapan pelanggan/konsumen pasarnya. Secara konseptual, mutu akan selalu berkaitan dengan pelanggan, pembeli, pemakai produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu lembaga maupun perseorangan
2. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam rangka menerapkan pengawasan dan evaluasi untuk mendapatkan pemetaan terhadap mutu pendidikan di Indonesia, maka pemerintah atau lembaga, serta lembaga mandiri yang ditunjuk dan memiliki kewenangan untuk menentukan kelayakan/ program dari satuan pendidikan baik formal maupun non formal yang berdasarkan kepada aturan dan standar yang telah ditetapkan. Tujuan dan manfaat dari pelaksanaan akreditasi yaitu mengetahui bahwasahnya akreditasi sekolah/madrasah tidak saja bertujuan dan memberikan manfaat untuk pihak sekolah/madrasah saja, akan tetapi juga

memberikan manfaat bagi seluruh stakeholder bidang pendidikan, baik bagi kepala sekolah, guru, orang tua, peserta didik maupun pihak pemerintah

3. Akreditasi mempunyai dampak yang bisa membantu sebuah satuan lembaga semakin berkembang sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang sudah ditetapkan. Melalui akreditasi terdapat hal-hal yang mengarah dalam penjaminan mutu diantaranya dengan adanya proses peningkatan kualitas sekolah, mengetahui gambaran kinerja sekolah yang sebenarnya, sebagai gambaran kelayakan dalam penyelenggara pendidikan serta menjadi alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Adanya penetapan akreditasi sekolah diharapkan bisa memaksimalkan program yang nantinya tidak hanya mendapatkan penetapan akreditasi akan tetapi kualitas pendidikannya juga semakin lebih baik
4. Sekalipun sistem akreditasi ini telah disusun sedemikian rupa, namun pada pelaksanaannya belum banyak sekolah yang mampu memanfaatkan instrumen yang ada dalam akreditasi tersebut untuk meningkatkan kapasitas lembaga pendidikannya. Fakta ini terlihat dari masih maraknya sekolah yang memenuhi instrumen akreditasi ketika hendak dilaksanakan kegiatan visitasi semata, dan kemudian kembali tidak berjalan optimal mana kala proses visitasi telah usai dilaksanakan.

SARAN

Hasil dari akreditasi diharapkan digunakan oleh sekolah sebagai dasar dalam rangka pengembangan mutu sekolah, diharapkan BAP-S/M ketika mengeluarkan sertifikat akreditasi dilengkapi dengan rekomendasi.

Kelemahan sekolah, target pemenuhan, dan instansi/institusi yang bertanggung jawab selain itu diharapkan BAP-S/M dapat menerjunkan tim pemantau yang profesional dalam melihat progress pemenuhan standar yang harus dipenuhi sekolah dan dapat melakukan pembinaan berkelanjutan kepada insan pendidikan disekolah agar dapat meingkatkan mutu pendidikan di Indonesia dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afridoni, et al. (2022). Manajemen Akreditasi Sekolah Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan. Jurnal Pendidikan Tambusai. Halaman 13832-13838 Volume 6 Nomor 3
- [2] Ajpru, H., Wongwanich, S., & Khaikleng, P. (2014). Design of Educational Quality Assurance System for Driving Policy of Educational Reform in Thailand: Theory-based Evaluation. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116(22),14161422. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.408>
- [3] <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.408>
- [4] Aljarrah, K., & Khataybeh, A. (2021). Representing Teaching Staff in Jordanian Universities for The 21st Century Skills. Pegem Egitim ve Ogretim Dergisi, 11(3), 17-25. <https://doi.org/10.14527/pegegog.2021.00>
- [5] Amelia, R., Suriansyah, A., Aslamiah, & Ngadimun. (2019). The new paradigm of leadership at elementary schools in borneo in the industrial revolution 4.0 Era. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 5(5).
- [6] Andriesgo, J., Haris, R., & Joni Hendra. (2020). Analisis Problematika Mutu Pendidikan Tingkat Dasar Berdasarkan Hasil Akreditasi di Kabupaten Kuantan Singingi. Al-Tanzim:

- Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol. 04 No. 02: 159-
- [7] 170. DOI: <http://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i2.1099>
- [8] Aslamiah, A., Abbas, E. W., & Mutiani, M. (2021). 21st-Century Skills and Social Studies Education. *The Innovation of Social Studies Journal*, 2(2), 82–92.
- [9] Aslamiah, A., Cinantya, C., Rafianti, W. R., Ngadimun, N., Amelia, R., Sari, L. A., & Aulia, N. (2023). Superior Educational Institution Model in Elementary School: The Case Study of Education in Banjar District, Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*, 6(10). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i10-32>
- [10] Asopwan, Didin. (2018). "Studi Tentang Akreditasi Dalam Meningkatkan Produktivitas Sekolah" 2, no. 28
- [11] Astenia, Dewi, (2020). *Evaluasi Program Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/ Madrasah*. Bandung: Widina Bhakti Persada
- [12] Asy'ari, H., Munawaroh, Z., & Ilmi. U. (2021). Analisis Pelaksanaan Akreditasi Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs Pembangunan UINJakarta. *Jurnal Idarah: Pendidikan dan Kependidikan*, Vol. 5No.2(2021) pp. 143-162pISSN: 2549-8193| eISSN: 2656-8012
- [13] Awaludin, A. A. (2017). Akreditasi Sekolah Sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal SAP*, 2 (1)
- [14] Azizah, L.& Witri, S. (2021). Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Penerapan Total Quality Management dalam Program Akreditasi Sekolah. *Dawuh Guru: Jurnal Pendidikan SD/MI*. Vol. 1 No. 1. e-ISSN 2775-5789
DOI.10.35878/guru.v1i1.263
- [15] Cinantya, C., Aslamiah, A., & Suriansyah, A. (2024). Character Education Based on Religious Values in Early Childhood: A School Principal's Leadership Perspective. *International Journal of Social Science and Human Research*, 7(07). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i07-43>
- [16] Ching, Gregory S. (2013). Higher education accreditation in the Philippines: A literature review. *International Journal of Research Studies in Management*, Volume 2 Number 1, 63-74. DOI: 10.5861/ijrsm.2012.162
- [17] Fahrudin, A.A. (2020). Implementasi Total Quality Management Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MA Mamba'ul Hisan Sidayu Gresik. *Journal of Islamic Educational Management*, Vol 2, No. 1. DOI:
- [18] <https://doi.org/10.35719/jieman.v2i1.15> Haryati, Sri. (2014). An Evaluative Review of School Accreditation Implementation Program in Indonesian Contexts. *International Education Studies*; Vol. 7, No. 5; 2014 ISSN 1913-9020 E-ISSN 1913-9039 Published by Canadian Center of Science and Education
- [19] 1913-9039 Published by Canadian Center of Science and Education
- [20] Karyanto, U. G. & Rahman, A. (2015). Implikasi Akreditasi Sekolah terhadap Peningkatan Mutu Tata Kelola SMK Negeri 1 Oku. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 7 (2)
- [21] Lathifah, Z.K., Setyaningsih, S., & Wulandari D.. (2022). Development of Pesantren Internal Quality Assurance System Model Based on Education Unit Accreditation Instruments 2020. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 06 No. 04: 983-998
- [22] Pramana, et al. (2021). Strategies to Improved Education Quality in Indonesia: A

- Review. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), Volume 12, Issue 3, 1977-1994
- [23] Noorhapizah, Purwanti, R., Suriansyah, A., Aslamiah, Amelia, R., & Agusta, A. R. (2020). INTEGRATING ICT (ENGLISH CONVERSATION PRACTICE) IN ONLINE ENGLISH LEARNING FOR STUDENTS AT PGSD LAMBUNG MANGKURAT UNIVERSITY. 13th Annual International Conference of Education, Research and Innovation.
- [24] Nujumuddin. (2019). Dampak Kebijakan Akreditasi terhadap Peningkatan Kinerja Guru Madrasah. Jurnal Penelitian Keislaman, 15 (1)
- [25] Rahman, L.Z.(2020). Upaya Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam melalui Sistem Akreditasi dalam Perspektif Total Quality Management (TQM) di SD Muhammadiyah Karangbendo Bantul. Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, Volume 10, Nomor 2 <https://ejournal.iai.tribakti.ac.id/index.php/intelektual/indx>
- [26] Rahmaniati, Rita. (2022). Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Akreditasi Sekolah dan Madrasah bagi Kepala Sekolah dan Pengawas di Barito Selatan. PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Volume 7, Issue 2, Pages348–354.
- [27] Doi:<https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v7i2.2697>
- [28] Ríos, C. (2015). Quality Assurance in Higher Education in Spain: An Overview of the Accreditation System. International Research and Review: Journal of Phi Beta Delta, 5(1), 25–45.
- [29] Ríos, Alejandra Acevedo-De-los- & Oviedo, Daniel R. Rondinel. (2022). Impact, added value and relevance of an accreditation process on quality assurance in architectural higher education. Journal Quality In Higher Education VOL. 28, NO. 2, 186–204
- [30] <https://doi.org/10.1080/13538322.2021.197748>
- [31] Samsirin. (2015). Konsep Mutu dan Kepuasan Pelanggan dalam Pendidikan Islam. Jurnal At-Ta'dib. Vol. 10. No. 1
- [32] Suriansyah, A., Hadi, S., Putera, A. P., & Aslamiah. (2020). EDUCATION IN DISRUPTION 4.0 ERA DEVELOPMENT OF WORK CULTURE IN ELEMENTARY SCHOOL AT BANJARMASIN SOUTH KALIMANTAN INDONESIA. Hamdard Islamicus, 43. <https://doi.org/10.57144/hi.v43iSpecialIssue.247>
- [33] Suriansyah, Ahmad. (2014). Hubungan Budaya Sekolah, Komunikasi, dan Komitmen Kerja Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Negeri. Jurnal Cakrawala Pendidikan
- [34] Suriansyah, Aslamiah, Noorhapizah, Winardi, Dalle. (2019). The relationship between university autonomy, lecturer empowerment, and organizational citizenship behavior in Indonesian universities. Journal of Social Studies Education Research.
- [35] Zahroh, A.(2015). Total Quality Management: Capaian Kualitas Output Melalui Sistem Kontrol Mutu Sekolah. CENDEKIA, Vol. 9, No. 1, p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN